

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan pemikiran dan gagasan, disertai data dan fakta yang mendorong dilakukannya penelitian tentang konstruksi sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Berikut akan dipaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian (tujuan umum dan khusus), signifikansi penelitian (segi teoritis, kebijakan, praktis, dan isu serta aksi sosial), serta struktur organisasi disertai yang menjelaskan sistematika laporan penelitian.

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berakhirnya *millenium development goals* (MDGs) pada tahun 2015, negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (termasuk Indonesia) mulai konsen pada pengkajian mengenai kerangka kerja dan perencanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang secara global dapat diterapkan pada semua negara dengan tetap memperhatikan karakteristik serta menghargai kebijakan nasional masing-masing negara.

Penelitian mengenai konstruksi sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan ini dipandang perlu setidaknya karena tiga hal. Kesatu, warganegara dalam konteks demokrasi hakikatnya merupakan pemegang kedaulatan dan/atau kekuasaan, termasuk dalam menentukan arah pembangunan. Kewarganegaraan tidak hanya dinilai sebagai status semata, lebih daripada itu harus dipandang sebagai seperangkat hak yang dimiliki masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk praktik-praktik kewarganegaraan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya sehingga menjadi penentu seseorang sebagai anggota masyarakat modern (*modern citizenship*) (Turner, 2002; Kalidjernih, 2010; Smith, 2012). Masukan-masukan dari warga kemudian dapat dijadikan kerangka acuan pemerintah agar secara maksimal melaksanakan pembangunan yang selaras dengan harapan warganya.

Kedua, konstruksi sosial sebagai wujud partisipasi warganegara perlu terus dibangun. Hal ini penting, terutama dalam memberikan masukan dan pilihan-

pilihan alternatif akan kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah, utamanya mengenai kebijakan yang dinilai kurang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Selaras dengan itu, konstruksi sosial berposisi sebagai pesan yang kemudian akan diserap oleh warga serta dapat mempengaruhi orientasi dan pola partisipasi warganegara (Ingram & Schneider, 1993, hlm.334).

Ketiga, pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pola pembangunan yang menitikberatkan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa melupakan kebutuhan di masa yang akan datang dalam praksisnya perlu mendapat perhatian serta pengawasan dari setiap elemen warga sebagai penerima manfaat pembangunan. Konstruksi sosial warga berkontribusi dalam menekan pemerintah sebagai pengampu kebijakan. Disamping itu, ada juga kalangan profesional yang turut mengkonstruksi pemikirannya mengenai realitas sosial sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif (Arnold, 1990; Kelman, 1987; Quade, 1982).

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai suatu kerangka kerja pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan hidup masa kini tanpa melupakan tuntutan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Selaras dengan laporan Brundtland (IISD, 2010) yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

“development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, It is generally accepted that sustainable development calls for a convergence between the three pillars of economic development, social equity, and environmental protection. (hlm. 2)

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersurat di atas, pembangunan berkelanjutan atau oleh Peneliti dikatakan sebagai *present and future development* mempunyai tiga pilar pembangunan utama, meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan visioner yang diterapkan berbagai negara, dengan ciri adanya keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya akan Peneliti tulis dengan istilah SDGs merupakan konsep pembangunan yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat dengan upaya pelestarian

lingkungan. SDGs mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat (terutama bagi negara-negara dengan standar hidup yang rendah) yang pada saat bersamaan dilakukan berbagai upaya perlindungan sumber daya alam dan lingkungan sebagai akses pelaksanaan pembangunan. Logika yang menjadi acuannya adalah bahwa kesejahteraan ekonomi dan sosial tidak dapat diperbaiki dengan tindakan yang merusak lingkungan. Ketiga dimensi tersebut saling terkait serta merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Dengan kata lain pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral dan spiritual dengan memperhatikan keragaman budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dasar dari semua aspek di atas adalah terselenggaranya penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, serta partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Namun, sekalipun secara konseptual gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) amat ideal, akan tetapi, konsep tersebut dalam pelaksanaannya sulit untuk dipahami dan dilaksanakan. Tren berkelanjutan dalam pembangunan sampai saat ini belum menemukan bentuk dan formatnya, terutama untuk dapat dimasukkan dalam rancangan dan praksis pembangunan nasional secara selaras dan seimbang. Seperti dikemukakan oleh Abdoellah (Tersedia dalam <http://www.unpad.ac.id/2015/09/isu-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-masih-sebatas-retorika>, diakses tanggal 12 Februari 2016) bahwa isu pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 1987 hingga saat ini masih sebatas wacana dan retorika, hal tersebut dilihat dari semakin banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penyebab belum maksimalnya praksis pembangunan berkelanjutan di Indonesia tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Kesatu, komitmen politik pemerintah belum sepenuhnya memahami pola pembangunan berkelanjutan. Kedua, beberapa pemimpin daerah belum mampu mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan RPJMN yang terlihat dari banyaknya

aktivitas perusakan lingkungan, semata untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerahnya. Ketiga, ekonomi Indonesia saat ini masih mengandalkan sektor sumber daya alam, dimana eksploitasi sumber daya alam terlalu ekstraktif, seolah sektor ini merupakan kekayaan alam yang tidak akan habis.

Selanjutnya, hasil penelitian Sari dan Prabatmodjo (2012, hlm. 361) mengungkap bahwa pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan, ditinjau dari segitiga keberlanjutan dapat dikatakan masih belum mencapai kesetimbangan untuk ketiga aspek pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik pada bidang ekonomi dan bidang sosial, akan tetapi perlindungan lingkungan semakin tertinggal jauh. Melihat hasil penelitian tersebut, maka pemerintah bersama dengan masyarakat harus sama-sama melaksanakan dan mendukung secara penuh seluruh program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development program*) yang dilaksanakan.

Kesatu, pemerintah harus mampu menentukan fokus pembangunan bidang lingkungan yang akan dicapai berdasarkan prioritas dan kewenangannya sekaligus mengupayakan kerjasama antar wilayah terkait dengan eksternalitas, efektivitas dan efisiensi. Kedua, disamping pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif dalam program-program peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan disekitarnya. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan kota. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan hendaknya dapat dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menyentuh seluruh dimensi yang ada.

Spirit untuk menjalankan program-program pembangunan berkelanjutan di Indonesia, harus secara konsisten dilaksanakan secara sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di era otonomi daerah dan desentralisasi yang saat ini berkembang di Indonesia yang semuanya amat ditentukan oleh daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah daerah amat penting keberadaannya untuk dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan penataan daerah. Pertanyaan kemudian adalah mengapa pemerintah daerah? Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan amat tergantung pada tinggi-rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

Fenomena seperti ini bukan saja gejala yang muncul di Indonesia, melainkan terjadi pula di tingkat dunia. Masyarakat meletakkan harapan kepada para walikota untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia, seperti; perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, dan tata niaga perdagangan obat (Barber, 2013). Harapan besar pembangunan berada di daerah disebabkan oleh setidaknya tiga alasan. Kesatu, kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi. Kedua, kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga, para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai posisi sentral dalam mendukung keberhasilan SDGs karena pemerintah daerah (kota/kabupaten) berada lebih dekat dengan warganya serta memiliki kewenangan dalam mengelola dana pembangunan seluas-luasnya yang oleh karenanya dapat melakukan berbagai inovasi dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Akan tetapi, jika berangkat dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia dinilai belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV (Hoelman dkk, 2015). Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah tidak aktif terlibat dalam pelaksanaan MDGs. Untuk itu, dalam SDGs, pemerintah daerah dan para

pemangku kepentingan di daerah harus lebih siap dan lebih mampu melaksanakan upaya-upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penataan daerah. Kesempatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat 2 diantaranya; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

SDGs sebagai kerangka kerja pembangunan daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang demokratis. Hal ini dimungkinkan, karena dilihat dari makna dan hakikat demokrasi dan pembangunan berkelanjutan mempunyai keselarasan, karena kedua konsep ini pada hakikatnya berbicara tentang bagaimana menata, mengatur, serta membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani yang diidam-idamkan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi (Djajadiningrat, 1992). Dikatakan sebagai indikator keberhasilan demokrasi, dikarenakan jika dilihat secara konsep, prinsip dan tujuannya, kaidah-kaidah dalam pembangunan berkelanjutan amat relevan dengan sejumlah prinsip dalam demokrasi, yakni; pemerataan dan keadilan, pendekatan integratif, perspektif jangka panjang, keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan politik, dan keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai konsep dan praksis demokrasi, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial. Gelombang demokratisasi ternyata memperoleh sambutan baik, hal mana ditandai oleh terjadinya kontekstualisasi demokrasi yang mempertemukan prinsip universal dengan nilai-nilai kultural yang lokal. Kiranya, tidak ada satu

kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan. Sekaitan dengan itu, partisipasi masyarakat menjadi penting keberadaannya sebagai salah satu indikator utama dalam mendukung tercapainya upaya demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Di era teknologi dan informasi yang saat ini sedang melanda dunia, publik memiliki peluang untuk dapat memberikan gagasan dan masukan-masukannya akan kebijakan pembangunan di daerah melalui media sosial. Posisi media yang saat ini dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi, berfungsi sebagai sarana diskusi politik di kalangan warga negara. Karenanya, keberadaan media mempunyai posisi strategis untuk menggalang partisipasi warga negara dalam menyampaikan gagasan-gagasan ikhwal perbaikan mutu pembangunan demokrasi. Dikatakan demikian, karena sekalipun demokrasi menempatkan keunggulan individu sebagai pemegang hak yang setara, tetapi dalam prakteknya proses politik tetap memerlukan tindakan kolektif yang melibatkan keseluruhan warga negara.

Media dalam hal ini menempati posisi sebagai *'the public sphere'* atau ruang publik sebagai wahana tukar gagasan antarwarga menyoal realitas kehidupan sosial yang mereka alami (Habermas, 1991; McNair, 2003). Terbentuknya opini publik bermula dari adanya opini individu/perseorangan dalam menyingkap tabir praksis pembangunan pada tataran realitas. Namun demikian, sekalipun opini disampaikan oleh individu secara perorangan, akan tetapi ketika itu dilakukan melalui kanal-kanal informasi publik maka dapat merangsang dan menjadi cikal bakal terbentuknya opini publik dalam kerangka solidaritas sosial.

Warga negara dalam hal ini tidak hanya berposisi sebagai individu, tetapi telah menjelma sebagai badan publik ketika terjadi diskursus antarwarga melalui cara-cara yang tak terbatas ruang dan waktu, yakni dalam suatu jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul serta dalam suasana yang bebas untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat masing-masing. Gagasan ekstrim mengenai peran ruang publik sebagai sebuah arena penciptaan solidaritas

sosial, dikemukakan Habermas (2001) melalui teori diskursusnya yang menjelaskan bahwa:

“Integrasi dan solidaritas sosial masyarakat-masyarakat yang kompleks tidak lagi dapat dijamin oleh agama atau pandangan-pandangan metafisis, melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi sosial untuk mencapai saling pengertian di antara para warga negara dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup” (hlm.767).

Melalui gagasan di atas, Habermas mencoba menerabas setiap bentuk intimidasi yang mengkebiri demokrasi sekalipun itu berangkat dari pandangan-pandangan fundamentalisme religius. Memang, pernyataan kritis yang disampaikan nampaknya kurang relevan untuk dijadikan dasar pijak pengembangan demokrasi di Indonesia yang telah memproklamkan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Akan tetapi, terlepas dari adanya ketidaktepatan tersebut peneliti melihat ada satu hal yang mesti dipahami oleh negara yang menganut paham demokrasi, bahwa perjalanan pemerintahan mutlak harus didasarkan pada kehendak dan harapan masyarakat yang tentunya harus tetap dilandasi semangat religiusitas dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Karena itu, gagasan-gagasan yang disampaikan warga sebagai hasil perenungan akan realitas yang banyak menampilkan distorsi antara *das sollen* dan *dass sein* hendaknya dilakukan sebagai wujud kecintaan terhadap negara sebagai bagian dari kecintaannya terhadap Tuhan YME.

Dalam konteks Indonesia, era keterbukaan informasi yang saat ini berkembang telah memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut analog dengan hasil studi pembangunan politik di negara-negara yang sudah menikmati stabilitas politik dan harmoni sosial telah menunjukkan bahwa “kebebasan informasi dan hak rakyat untuk mendapatkan informasi memainkan peranan sentral dalam keseluruhan proses politik” (Lay, 2006). Tidak ada satu pun negara yang mampu menjamin stabilitas politik dan tertib sosial secara berkesinambungan, kecuali sistem tersebut difasilitasi dengan jaminan kebebasan informasi.

Posisi strategis media nampak dalam pernyataan “*The press in particular ‘wa to function as an instrument or a forum for the enlightened, rational, critical, and unbiased public discussion of what the common interests were in matters of culture and politics’*” (Gripsund, 1992, hlm.89). Melalui pernyataan ini pers mempunyai fungsi sebagai instrumen atau forum masyarakat untuk berdiskusi secara rasional, kritis, dan berisi kepentingan umum dalam hal budaya dan politik. Media sebagai ruang publik yang mempunyai kekuatan politik yang kuat ditegaskan oleh McNair (2003, hlm.20) bahwa “*the public sphere is that ‘distinctive discursive space’ within which ‘individuals are combined so as to be able to assume the role of a politically powerful force’*”. Bagi McNair, ruang publik yang dalam konteks ini dipahami sebagai media sosial merupakan “ruang diskursif yang khas” yang mengumpulkan beberapa individu dalam satu wadah sehingga menjadi sebuah kekuatan politik yang kuat.

Adanya relasi yang kuat antara media dalam mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan menjadikan munculnya gagasan tentang jurnalisme warga (*citizen journalism*) sebagai wujud nyata keterlibatan warganegara dalam mencurahkan gagasan-gagasan berupa saran dan atau kritik atas situasi dan kondisi yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi pengembangan jurnalisme warga (*citizen journalism*) dalam kaitannya dengan proses pembangunan berkelanjutan adalah berjalannya *check and balances* antara pemimpin (pemerintah) dan yang dipimpinnya (rakyat). Hal tersebut senada dengan pandangan bahwa “demokrasi dialogis dapat mencairkan konflik-konflik yang terjadi, sehingga konflik yang terjadi dapat diredam melalui musyawarah (deliberatif) melalui penciptaan ruang publik, dan tempat partisipasi politik warga negara” (Habermas, 2001, hlm.768).

Kemunculan jurnalisme warga paling tidak dipengaruhi oleh dua hal. Kesatu, seiring dengan perkembangan internet web 2.0 yang memberikan peran kepada masyarakat sebagai peneliti lepas yang tidak terikat, bahkan tidak harus tunduk pada aturan-aturan ketat jurnalisme. Kedua, jurnalisme warga diilhami oleh adanya kekecewaan publik terhadap media *mainstream* yang mengalami kelunturan idealism (Daulay & Jacky, 2010). Melalui pengembangan jurnalisme

warga (*citizen journalism*) masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi konsumen berita, saat ini mulai menjadi pemain baru dalam jurnalistik. Karena itu, jurnalisme warga membuka peluang partisipasi masyarakat secara meluas yang sangat dibutuhkan dalam membangun demokrasi melalui kekuatan informasi yang tersedia dan memungkinkan banyak orang terlibat, bermusyawarah, dan bertindak secara kolektif terutama dalam melakukan konstruksi sosial atas realitas politik yang terjadi.

Posisi jurnalisme warga dalam memberikan pilihan-pilihan alternatif bagi pemerintah (pusat maupun daerah) untuk melaksanakan pembangunan, diharapkan menjadi pendorong terciptanya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada masyarakat demokratis. Pembangunan berkelanjutan sebagai pola pembangunan futuristik dijelaskan Budimanta (2005) sebagai berikut

“Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya” (hlm.14)

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya keselarasan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, posisi jurnalisme warga menjadi penting keberadaannya dalam mendorong keberhasilan konsep dan praksis pembangunan berkelanjutan, karena partisipasi publik merupakan hal penting yang harus ada dan diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, Peneliti menemukan bahwa salah satu pemerintah daerah yang kosen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terintegrasi dengan pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi dengan warga adalah pemerintah Kota Bandung. Dilihat dari tiga indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan berkelanjutan, dapat dikatakan bahwa Kota Bandung telah melaksanakan upaya-upaya sebagaimana dimaksud. Sebagaimana tercermin dalam Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Bandung Tahun 2013-2018, pemerintah Kota Bandung konsen terhadap sembilan isu pembangunan strategis, antara lain; lingkungan hidup, infrastruktur, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; pemberdayaan masyarakat dan ketahanan keluarga; penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; reformasi birokrasi dan tata kelola; dan iklim usaha, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung juga tersurat dalam 10 mimpi masa depan Bandung yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung (Kamil, 2015, antara lain :

1. Merancang taman kota senyaman ruang keluarga,
2. Merekayasa lalu lintas untuk kenyamanan warga,
3. Menyediakan bangunan publik yang modern,
4. Mengaplikasikan seni pada elemen kota,
5. Menyediakan gedung *creative corner* dan *development center*,
6. Memotivasi kegiatan berjalan kaki untuk kehangatan interaksi sosial,
7. Merayakan kebersamaan dengan keragaman festival,
8. Mengembalikan sungai cikapundung ke fitrahnya,
9. Menata wajah kota dari papan reklame yang semrawut, dan
10. Meramahi lingkungan dengan *green policy* (hlm.169-173)

Kebijakan-kebijakan yang diambil dan 10 mimpi untuk masa depan Bandung tersebut merupakan pengejawantahan dari harapan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. Kesatu, pemerintah Kota Bandung memanfaatkan website lapor.ukp.go.id sebagai upaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dengan menjadikan media sosial sebagai *platform* dalam menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat menuju reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) ini, publik yang selama ini menilai pemerintah selalu berjarak dengan masyarakat perlahan mulai menghilangkan sentimen tersebut. Kapanpun dan dimanapun, masyarakat dapat menyampaikan keluh kesahnya mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Pola komunikasi seperti ini menurut peneliti amat efektif dalam membangun hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Disamping itu, keluh-kesah dan harapan warga dapat dikanalisis agar tertuju tepat kepada institusi dan pejabat yang berwenang menjawab dan menuntaskan persoalan tersebut. Misalnya, laporan mengenai sampah yang berserakan akan secara cepat

dan tepat ditujukan kepada Dinas Kebersihan, begitu juga laporan tentang jalan rusak akan ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum.

Kedua, penggunaan media online sabilulungan.go.id sebagai media transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung yang selama ini banyak terjadi penyimpangan. Terdapat kemajuan yang cukup signifikan setelah diterapkannya Hibah Bansos Online Sabilulungan di Kota Bandung, antara lain meningkatnya kesadaran penerima hibah dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial serta berkurangnya hasil temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai penyimpangan penggunaan anggaran.

Ketiga, Walikota Bandung memanfaatkan media sosial untuk menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui *facebook* (Ridwan Kamil), *twitter* (@ridwankamil), dan *instagram* (ridwankamil) walikota menyampaikan berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dari mulai pembangunan infrastruktur sampai pembangunan suprastruktur. Disamping itu, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi dan masukan-masukannya terkait dengan rencana pembangunan kota Bandung, tidak terkecuali permasalahan-permasalahannya.

Keempat, setiap kecamatan di Kota Bandung pun mempunyai twitter tersendiri. Tujuannya, agar mereka (pemerintah kecamatan) dapat menginformasikan program-program pembangunan yang dilaksanakannya. Disisi lain, masyarakat yang berdomisili di kecamatan tersebut pun dapat dengan mudah menyampaikan harapan dan aspirasinya kepada pemerintah. Disamping keempat contoh di atas, masih banyak lagi terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan media sosial.

Melalui jejaring sosial, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bersama-sama dengan pemerintah kapanpun dan dimanapun. Hal ini sepadan dengan pandangan bahwa “hidup bisa lebih mudah saat kita bersepakat untuk kompak, hidup lebih ringan saat kita rajin berbagi, hidup lebih maju saat kita senang berkolaborasi” (Kamil, 2015, hlm.vii). Pandangan inilah yang pada akhirnya mendorong Walikota Bandung untuk memanfaatkan media

sosial yang sedang menjadi tren masyarakat sebagai wahana penjangkaran aspirasi dan harapan warga Bandung. Ia meyakini bahwa mengubah Bandung dan mengubah dunia harus dilaksanakan secara bersama-sama, dalam arti ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Lubis dengan Walikota Bandung (Tersedia dalam <http://www.rappler.com/indonesia/107170-wawancara-ridwan-kamil-mimpi-bandung-juara>, diakses tanggal 17 Februari 2016) mengungkap bahwa media sosial di Kota Bandung telah dimanfaatkan warga untuk memberikan masukan-masukan demi kemajuan daerah. Kesatu, Walikota Bandung sangat terbuka terhadap kritikan yang berbasis data dan fakta. Kedua, dalam melaksanakan pembangunan setidaknya dilibatkan empat stakeholders utama, yakni pemerintah (*government*), pebisnis (*privat sector*), komunitas masyarakat (*civil society*), dan media (sebagai *information power*).

Sekaitan dengan keberfungsian media sebagai sarana penjangkaran aspirasi, adalah hal biasa bila terjadi pro kontra akan suatu kebijakan. Ini terjadi oleh karena masing-masing individu mempunyai kebebasan untuk mengkonstruksi realitas berdasarkan sudut pandang dan pemahamannya masing-masing. Di Kota Bandung misalnya, banyak masyarakat yang memuji keberhasilan pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan, disisi lain ada pula masyarakat yang menganggap pemerintah kota belum berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Dualisme pandangan masyarakat mengenai pembangunan yang sedang berjalan, nampak dalam ilustrasi berikut.

Kesatu, hasil studi Lingkaran Studi Informasi dan Demokrasi (eLSID) yang dilansir dalam <http://www.rappler.com/indonesi> (diakses tanggal 17 Februari 2016) menjelaskan bahwa semakin terjadi penurunan mengenai tingkat kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah kota Bandung hingga mencapai 27 %. Survey yang mengambil sampel 415 responden dengan tingkat kepercayaan terhadap survei mencapai 95 persen dan *margin of error* sebesar 5,1 persen ini mengungkap bahwa penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah disebabkan oleh; reformasi birokrasi yang digaungkan dinilai tidak berjalan baik, program-program yang digulirkan tidak seiring dengan harapan

warga, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih minim dimana basis pergerakan program yang dilakukan selama ini selalu mengandalkan dana dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pembangunan infrastruktur cenderung lebih mendominasi yang akhirnya mengesampingkan pembangunan suprastuktur dan sumber daya manusia.

Kedua, sebagaimana peneliti temukan dalam fanpage @ridwankamil (*twitter*) dan laman facebooknya, banyak masyarakat terutama kaum muda yang memandang bahwa era pemerintahan Ridwan Kamil telah membawa perubahan yang signifikan, terutama dilihat dari pembangunan infrastruktur kota. Disamping itu, selama kepemimpinan Ridwan Kamil, pemerintah Kota Bandung mendapat berbagai penghargaan nasional. Pada 2014 lalu, pemerintah Kota Bandung memperoleh penghargaan dari Ombudsman sebagai kota yang paling cepat melaksanakan reformasi pelayanan publik. Baru-baru ini, Kota Bandung memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kota anti korupsi.

Adanya dualisme pandangan atas pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa setiap warga negara dapat mengkonstruksi realitas sosial sesuai dengan objektivitas sekaligus subjektivitasnya sebagaimana dikatakan Berger dan Luckmann (2013) bahwa masyarakat sebagai kenyataan subjektif dan objektif. Realitas sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif yang menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum ke kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang sedang saling berintegrasi dan berinteraksi (Parera, 2013).

Kendati setiap warga negara mempunyai kesetaraan dan kebebasan dalam mengkonstruksi realitas, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua realitas sosial dapat dikonstruksi oleh warga negara. Ragam keputusan akan makna realitas sosial justru banyak pula dipengaruhi oleh konstruksi lain yang dibangun oleh individu yang berbeda. Kenyataan tersebut pada akhirnya menggiring kita pada pertanyaan mengenai bagaimana warga negara mengkonstruksi realitas sosial serta adakah implikasi dari realitas sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial terhadap kehidupan masyarakat demokratis.

Media sosial sebagai sarana konstruksi sosial diciptakan melalui dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural yang berlangsung dalam tiga momen dialektis yang berjalan secara simultan, meliputi eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Parera, 2013). Terlepas dari realitas sosial yang dikonstruksi oleh warga negara dalam kapasitasnya sebagai individu yang otonom tidak selamanya menggambarkan kondisi yang sebenarnya dalam pengertian terjadi distorsi antara realitas dan informasi yang diberikan, namun opini yang disampaikan turut andil dalam menentukan pilihan-pilihan warga lainnya dalam memutuskan realitas sosial yang akan diyakini sebagai kebenaran publik.

Melalui berbagai penjelasan di atas, teridentifikasi setidaknya tujuh persoalan yang dapat disarikan sebagai berikut:

1. Pembangunan di Kota Bandung ditinjau dari segitiga keberlanjutan, masih belum mencapai kesetimbangan dimana aspek lingkungan masih jauh tertinggal dari aspek ekonomi dan aspek sosial
2. Pelaksanaan pembangunan belum secara maksimal meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam membangun pemerintahan
3. Adanya pengingkaran terhadap partisipasi publik meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan demokrasi semu menjadi demokrasi hakiki baik secara prosedural maupun substansial
4. Pembangunan berkelanjutan memerlukan adanya partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam memberikan pilihan-pilihan alternatif bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.
5. Terjadinya pergeseran hakikat dan fungsi jurnalistik dimana informasi yang disampaikan media massa (cetak dan elektronik) menunjukkan keberpihakan, mengalami kelunturan idealisme, dan berorientasi pada keuntungan semata
6. Masih rendahnya kualitas masyarakat dalam memberikan saran dan kritik bagi peningkatan mutu pembangunan.
7. Pemberitaan dalam jurnalisme warga (khususnya media *online*) yang dibuat oleh sebagian besar kalangan non-profesional dikhawatirkan mempunyai kadar kebenaran rendah yang mengakibatkan munculnya

kerisauan masyarakat, karena banyak realitas sosial yang dikonstruksi mempunyai distorsi dengan realitas yang sesungguhnya.

Bertolak dari data, fakta dan pemikiran atas masalah yang teridentifikasi, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana masyarakat mengkonstruksi realitas sosial atas makna pembangunan yang dilakukan melalui sebuah penelitian dengan *problem statement* "konstruksi sosial warga bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan".

Penelitian ini berpijak pada gagasan teoritis Berger dan Luckman (2013, hlm.47) yang menyatakan bahwa "pengetahuan masyarakat adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, wacana publik sebagai hasil dari konstruksi sosial". Manusia sebagai pencipta realitas mempunyai kemampuan untuk mengadakan objektivasi yang telah memanifestasikan diri ke dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari kehidupan kolektif. Pernyataan tersebut diamini oleh Bungin (2011, hlm.11) yang mengatakan bahwa "dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya". Ini menunjukkan bahwa manusia merupakan individu kreatif yang dapat melakukan apapun, termasuk dalam mengkonstruksi realitas yang dipandang menjadi sebuah pengetahuan baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

Peneliti melihat bahwa amat penting dilakukan kajian mendalam mengenai konstruksi sosial atas makna pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai keberhasilan demokrasi. Sentuhan pendidikan kewarganegaraan dipandang relevan dengan penelitian ini dikarenakan munculnya konstruksi sosial atas makna pembangunan berkelanjutan merupakan konsekuensi dari pemenuhan hak dan kewajiban warganegara. Kewarganegaraan oleh karenanya tidak hanya dinilai sebagai status semata, lebih daripada itu harus dipandang sebagai seperangkat hak yang dimiliki masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk praktik-praktik kewarganegaraan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya dan lain

sebagainya sehingga menjadi penentu seseorang sebagai anggota masyarakat modern (*modern citizenship*) (Turner, 2002; Kalidjernih, 2010; Smith, 2012).

Kajian ini merupakan salah satu bentuk dari praktek pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, dimana pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya tidak hanya dilakukan di kelas/sekolah, namun secara lebih luas termasuk di lingkungan keluarga, masyarakat, organisasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam kaitannya dengan pencapaian kompetensi kewarganegaraan yang meliputi *civic knowledge, civic skills, and civic disposition* (Cogan, 1999; Branson, 1999).

Tidak terbatasnya pelaksanaan pendidikan hanya pada tingkat persekolahan selaras dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Karena itu, praksis pendidikan harus senantiasa melibatkan dan menjadi tanggung jawab seluruh warganegara (bukan hanya sekolah). Penelitian ini turut mengembangkan substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah/mata pelajaran yang wajib diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah ataupun pendidikan tinggi (Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), terutama agar tidak terjebak pada aspek kurikuler dan ekstrakurikuler saja, tetapi juga dalam dimensi sosial kultural.

Penelitian ini mempunyai unsur kebaruan dalam pengembangan khasanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan, yakni ketika peneliti menelaah pendidikan kewarganegaraan dalam praksis di masyarakat dan pemerintahan dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi di dalamnya yang akan dikaji secara fenomenologi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan konteks permasalahan sebagaimana telah diidentifikasi, fokus masalah dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan ditinjau dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Secara spesifik, substansi persoalan tersebut telah peneliti rinci ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana warga Bandung mengkonstruksi makna pembangunan berkelanjutan ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?.
2. Bagaimana posisi media sosial sebagai sarana diskursus sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?.
3. Realitas sosial seperti apa yang hendak dibangun oleh warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?.
4. Bagaimana implikasi realitas sosial yang dibentuk oleh warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat demokratis dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai sejumlah tujuan baik yang sifatnya umum maupun khusus. Berikut merupakan tujuan penelitian sebagaimana tercermin dari perumusan permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan yang pada akhirnya hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh para pemerhati, pengembang dan para pemangku kebijakan dalam menumbuhkembangkan spirit pembangunan dan demokratisasi berbasis kesukarelaan, kemandirian dan partisipasi pada masyarakat informasi.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan konstruksi makna pembangunan berkelanjutan yang dilakukan warga Bandung ditinjau dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Mengkaji dan mengidentifikasi posisi media sosial sebagai sarana diskursus sosial warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Menganalisis realitas sosial yang hendak dibangun oleh warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. Mengkaji serta menganalisis implikasi realitas sosial yang dibentuk oleh warga Bandung atas makna pembangunan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat demokratis dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai signifikansi dalam mengembangkan serta memperkuat kedudukan rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan sebagai *integrated knowledge system* dalam membangun kehidupan demokratis (*democratic of life*) karena pendidikan kewarganegaraan dan media massa sama-sama bertuju pada penguatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*), khususnya dalam membangun budaya demokrasi yang sarat nuansa partisipasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mempunyai sejumlah manfaat dilihat dari segi teoritis, kebijakan, praktis, serta isu dan aksi sosial sebagai berikut:

1. Segi Teoretis

Secara teoretis penelitian ini akan menggali, mengkaji, dan menganalisis peran strategis media sebagai sarana warga negara mengkonstruksi makna pembangunan berkelanjutan dalam iklim yang demokratis. Penelitian ini bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan kerangka konseptual ikhwal konstruksi sosial yang berkembang pada masyarakat demokratis, pluralitas dan

Epin Saepudin, 2017

KONSTRUKSI SOSIAL WARGA BANDUNG ATAS MAKNA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dinamisasi dalam proses konstruksi sosial melalui diskursus sosial, serta dialektika konstruksi sosial pada masyarakat demokratis dalam menciptakan warga negara partisipatif. Karena itu, penelitian ini secara teoretis dapat memperkaya wawasan dan keilmuan pendidikan kewarganegaraan terutama dalam dimensi sosio-kultural dan kemasyarakatan.

2. Segi Kebijakan

Dilihat dari segi kebijakan, penelitian ini mempunyai kontribusi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis terkait pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berbasis harapan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan masukan-masukan bagi pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan dan penegakkan hukum terkait etika dan tata laku warga dalam menyampaikan gagasan, pandangan, saran dan kritik di media sosial. Sekalipun secara tertulis sudah ada UU ITE yang mengatur hal tersebut, namun yang belum berjalan efektif adalah dari sisi penegakkan aturan di lapangan.

3. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pemberdayaan, pencerdasan dan pendewasaan masyarakat dalam membangun kultur demokrasi partisipatif sebagai upaya menciptakan keterlibatan politik (*political engagement*) warga negara.
- b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dalam rangka membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*), utamanya terkait pemanfaatan media informasi sebagai pilar demokrasi

dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Dari segi isu dan aksi sosial, hasil penelitian dapat memberikan pencerahan sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya melalui keterlibatan warganegara untuk memberikan informasi, gagasan dan atau kritik konstruktif secara transparan dan akuntabel.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan hasil penelitian disertasi ini secara terstruktur mengacu pada ketentuan dan pola yang diterapkan di Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi lima bab yang secara sistematis meliputi; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, impikasi dan rekomendasi.

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang landasan pemikiran disertai rasionalitas yang menekankan perlunya studi mendalam mengenai masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari lima sub bab, meliputi; latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II kajian pustaka, menjelaskan tentang berbagai konsep, generalisasi, teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan akan digunakan untuk mengkaji hasil penelitian. Hasil telaah sebagaimana dimaksud terdiri dari; teori konstruksi sosial media massa, konsep pembangunan berkelanjutan, teori demokrasi, teori kebijakan publik, media massa, *cyber space*, dan demokratisasi di indonesia, kajian pendidikan kewarganegaraan mengenai *community civic* dan partisipasi politik sebagai prasyarat demokrasi, dan hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

Bab III metode penelitian, menjelaskan desain dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan pula berbagai rasionalisasi pemilihan desain, pendekatan, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi data secara terstruktur, sistematis dan komprehensif.

Bab IV hasil dan pembahasan, menjelaskan temuan-temuan penelitian secara deskriptif selaras dengan perumusan masalah pada bab I. Data hasil penelitian yang disajikan dan diperoleh secara fenomenologis ini kemudian dianalisis menggunakan berbagai konsep, pendekatan, teori, dan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana dimuat pada bab II.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, menjelaskan beberapa simpulan sebagai akhir dari penelitian dan menjawab secara spesifik masalah-masalah yang dikaji disertai dengan dalil-dalil penelitian yang dihasilkan. Pada bab ini, dijelaskan pula implikasi penelitian terhadap pengembangan khasanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan secara teoritik maupun secara praktis terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi penelitian pada akhirnya melahirkan gagasan-gagasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah, praktisi pendidikan kewarganegaraan, dan peneliti berikutnya.